

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. *Value For Money*

Menurut Mardiasmo, *value for money* dalam pengelolaan organisasi sektor publik berpusat pada tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perekonomian melibatkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan biaya terendah, dengan membandingkan masukan tersebut dengan nilainya dalam istilah moneter. Efisiensi berarti memaksimalkan output dengan input tertentu atau menggunakan input paling sedikit untuk menggapai output tertentu, dengan membandingkan keluaran/masukan terhadap standar atau sasaran kinerja yang telah diputuskan. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil program mencapai target yang ditentukan, dengan membandingkan outcome terhadap output.<sup>1</sup>

##### a. **Indikator *Value For Money***

Dalam penggunaan konsep *value for money* harus mengetahui tentang beberapa bagian, yang akan diambil dan ditetapkan dalam pengukuran, yaitu seperti:<sup>2</sup>

- 1) Input mengacu pada sumber daya yang dipakai dalam melaksanakan suatu aktivitas serta menghasilkan output. Itu diukur dalam satuan moneter. Pengukuran input melibatkan perbandingan input tunai dengan input aktual.
- 2) Hasil langsung dari suatu proses yang dilakukan dengan menggunakan input disebut Output. Ukuran output memperlihatkan hasil implementasi kegiatan yang berupa barang atau jasa. Pengukuran output harus memiliki karakter seperti tepat waktu, sesuai harapan, dan tepat sasaran.
- 3) Outcome adalah hasil yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari suatu program. mengukur hasil yang digunakan untuk menghitung kualitas keluaran dan dampak yang dihasilkan. Outcome dapat diukur ketika kegiatan telah selesai.

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

Fungsi indikator kinerja pada *value for money* digunakan untuk menyajikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat ketentuan.<sup>3</sup> Menurut Mardiasmo indikator *value for money* yaitu :<sup>4</sup>

1) Indikator alokasi biaya (ekonomi)

Ekonomi mencakup perolehan barang dan jasa yang memenuhi kualitas tertentu dengan harga optimal. Ekonomi atau kehematan mencakup pengelolaan yang hati-hati (*prudency*) tanpa adanya pemborosan. Ekonomi (kehematan) merujuk pada biaya yang digunakan dalam melakukan sebuah program atau mendapatkan sesuatu. Tingkat ekonomi dari sebuah anggaran dapat diukur dari persentase pencapaian anggaran. Aspek ekonomi dalam pengelolaan keuangan diukur dengan membandingkan anggaran belanja dan realisasinya dengan menilai persentase pencapaiannya. Indikator ekonomi atau perubahan biaya dianggap baik jika realisasi belanja lebih rendah dari yang ditaksir.<sup>5</sup>

Rasio Ekonomis diukur menggunakan rumus di bawah :

$$\text{Rasio Ekonomis}^6 = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Belanja

Nilai Input : Anggaran Belanja

Golongan ekonomis adalah sebagai berikut :

Apabila  $x < 100\%$  tergolong ekonomis

Apabila  $x = 100\%$  tergolong ekonomis seimbang

Apabila  $x > 100\%$  tergolong tidak ekonomis

---

<sup>3</sup> Alwin Fedianto Tameon, Sarinah Joyce M. Rafael, and Linda Lomi Ga, 'Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perode 2017-2021', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11.1 (2023), 40–50 <<https://doi.org/10.35508/jak.v11i1.10250>>.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2015).

<sup>5</sup> Versiandika Yudha Pratama, Syamsuddin, and Farah Difa, 'Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan', *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1.2 (2022), 149–55 <<https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>>.

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

## 2) Indikator alokasi biaya (efisiensi)

Efisiensi mencakup perolehan keluaran tertentu dengan sumber daya minimal. Ini selaras dengan konsep produktivitas. Efisiensi dievaluasi dengan membandingkan keluaran yang dicapai dengan masukan yang dimanfaatkan (biaya keluaran). Suatu proses operasional bisa dikatakan efisien apabila menghasilkan produk atau hasil kerja tertentu dengan menggunakan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin. Organisasi sektor publik dianggap efisien ketika mereka memaksimalkan output dengan menggunakan input seefektif mungkin.<sup>7</sup>

Menurut Andriani dalam Pratama dkk, efisiensi (daya guna) yang terkait dengan efektivitas operasional, mencerminkan cara operasi yang dilakukan. Suatu aktivitas operasional dikatakan efisien bila menghasilkan produk atau pekerjaan dengan menggunakan sumber daya dan dana yang minimal. Efisiensi berkisar pada membandingkan output dengan input. Efisiensi kinerja Pemerintah Daerah ditunjukkan apabila rasio yang diperoleh lebih dari 100%, semakin tinggi rasio efisiensi, semakin baik kinerjanya. Efisiensi pengelolaan keuangan diukur dengan menghitung perbandingan antara hasil capaian program dengan realisasi anggaran.<sup>8</sup>

Menghitung Rasio Efisiensi memakai perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi}^9 = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Hasil yang dicapai oleh kebijakan program dan aktivitas

Input : Realisasi Anggaran

Golongan efisiensi adalah sebagai berikut:

Apabila  $x > 100\%$  tergolong efisien

Apabila  $x = 100\%$  tergolong efisiensi seimbang

Apabila  $x < 100\%$  tergolong tidak efisien

<sup>7</sup> Pratama, Syamsuddin, and Difa.

<sup>8</sup> Pratama, Syamsuddin, and Difa.

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

Standar yang digunakan dalam menghitung efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang lebih spesifik menurut Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam Hasanah yaitu :<sup>10</sup>

**Tabel 2.1**

**Kriteria Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi	Kategori
>100%	Sangat Efisien
>90-100%	Efisien
>80-90%	Cukup Efisien
>60-80%	Kurang Efisien
<60%	Tidak Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

3) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana keluaran memberikan kontribusi untuk menggapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Mahmudi menegaskan bahwa indikator kinerja mempunyai banyak segi dan rumit, tidak hanya mencakup kinerja keuangan saja, akan tetapi indikator non-keuangan juga. Sedangkan indikator keuangan biasanya berkonsentrasi pada input dan output, yang dibatasi pada anggaran dan realisasinya. Di sisi lain, indikator non finansial seperti kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan hasil layanan belum banyak terakomodasi.<sup>11</sup>

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi berhasil menggapai tujuannya. Efektivitas (hasil guna) mengukur keefektifan organisasi dalam menggapai tujuan yang telah ditentukan dengan membandingkan hasil dengan outcome dan output. Outcome menunjukkan dampak suatu program atau aktivitas terhadap warga, sedangkan output menunjukkan hasil yang diperoleh dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan bisa diketahui melalui

<sup>10</sup> Miftahul Hasanah and Merri Anitasari, 'Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas)', *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1.2 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10905>>.

<sup>11</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (3rd ed.) (UPP STIM YKPN, 2015).

perbandingan realisasi anggaran dengan penerimaan anggaran, serta persentase tingkat keberhasilannya.<sup>12</sup>

Menghitung Rasio Efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas}^{13} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan

Output : Hasil dari suatu kegiatan

Golongan efektivitas adalah sebagai berikut:

Apabila  $x > 100\%$  tergolong efektif

Apabila  $x = 100\%$  tergolong efektivitas berimbang

Apabila  $x < 100\%$  tergolong tidak efektif

Standar yang digunakan dalam menghitung efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih spesifik menurut Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam Aulia yaitu:<sup>14</sup>

**Tabel 2.2**

**Kriteria Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah**

Rasio Efektivitas	Kategori
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

**b. Manfaat Implementasi Value For Money**

Pemanfaatan konsep *value for money* dalam perhitungan kinerja pada organisasi sektor publik dalam memberi keuntungan baik untuk organisasi itu sendiri maupun warga negara. Keuntungan yang diharapkan dari penerapan *value for money* di organisasi sektor publik

<sup>12</sup> Pratama, Syamsuddin, and Difa.

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

<sup>14</sup> Erlinda Nur Aulia and Agustina Prativi Nugraheni, 'Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.6 (2022), 413-20 <<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>>.

meliputi keekonomian (hemat dan cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam pemanfaatan sumber daya, dan efektivitas (berhasil guna) dalam menggapai tujuan dan target.<sup>15</sup> Selain keuntungan tersebut, implementasi konsep *value for money* juga mengoptimalkan efektivitas pelayanan umum, sehingga pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan berkualitas. Hal ini mengurangi biaya pelayanan umum dengan menghilangkan inefisiensi dan menghasilkan penghematan dalam penggunaan input, sekaligus mengarahkan alokasi belanja lebih banyak untuk kepentingan umum. Selain itu, hal ini meningkatkan kesadaran akan biaya publik, yang berfungsi sebagai landasan untuk menerapkan akuntabilitas publik.<sup>16</sup>

## 2. *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti, konsep *good governance* merujuk pada proses pelaksanaan kekuasaan oleh negara dalam menyediakan barang serta layanan umum yang dikenal sebagai *governance* (pemerintahan atau pemerintahan),<sup>17</sup> sementara aksi optimalnya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik).<sup>18</sup> Pemerintahan berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat di negara-negara berkembang. Melalui kebijakan, program, proyek, serta pengembangan industri, pemerintahan menggerakkan pembangunan di suatu wilayah, yang juga didukung oleh perencanaan anggaran yang signifikan.<sup>19</sup> Bagian dari agenda reformasi adalah Pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan bersih, yang mencakup aspek profesionalisme, pertanggungjawaban, keterbukaan, pelayanan

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

<sup>16</sup> Melta Idriska, Novi Mubyarto, and Efni Anita, 'Analisis Pengukuran Value for Money Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2.1 (2023), 53–66.

<sup>17</sup> Sedarmayanti, *Good Governance Dan Good Corporate Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

<sup>18</sup> A Uar, 'Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1) (2016), 1–11.

<sup>19</sup> Crystha Armereo, 'Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palembang', *Jurnal Ekombis Review*, 9.2 (2021), 241–54.

unggul, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, kekuasaan hukum yang kuat, serta memiliki visi strategis.<sup>20</sup> *Good governance* yaitu konsep yang mengarah pada proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Konsep ini didasarkan pada konsensus yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara. *Good Corporate Governance* memiliki Sembilan prinsip, yaitu partisipasi warga, supremasi hukum, kepedulian terhadap warga, keselarasan dengan konsensus, efektivitas dan efisiensi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menunjukkan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang apik untuk menumbuhkan tata kelola yang sehat, khususnya pada pengelolaan keuangan negara dan daerah.<sup>21</sup>

### 3. Anggaran

Anggaran merupakan instrumen ekonomi utama yang dikelola oleh pemerintah dalam mengendalikan kemajuan sosial dan ekonomi, memastikan kelangsungan, serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup> Strategi jangka pendek suatu organisasi, yang memecah semua program menjadi rencana keuangan tahunan yang terperinci, disebut sebagai anggaran. Sederhananya, anggaran publik berupa dokumen yang memperlihatkan kondisi keuangan suatu organisasi, merinci pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan yang didanai oleh dana publik.<sup>23</sup>

Secara umum, anggaran disusun secara tertulis dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang kemudian dilaksanakan. Di samping itu, anggaran memiliki peran pengendalian, dengan membandingkan rencana yang dituangkan dalam anggaran dengan kejadian sebenarnya.

---

<sup>20</sup> Sondil E Nubatonis and others, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.1 (2014), 16–20.

<sup>21</sup> Woleola J Ekundayo, 'Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria', *International Journal of Humanities and Social Science*, 7.5 (2017), 154–61.

<sup>22</sup> Ramlah Basri, 'Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran', *Jurnal EMBA*, 1 (4) (2013), 202–12.

<sup>23</sup> Imanuel dan Sherly Pinatik Pangkey, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Emba*, 3 (4) (2015), 33–43.

Diperlukan metode penyusunan anggaran agar membantu penentuan langkah-langkah kegiatan di masa mendatang untuk memastikan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan target yang diinginkan. Pada dasarnya, anggaran disusun memiliki tujuan agar sumber daya dalam daerah digunakan secara efisien dan efektif.<sup>24</sup> Dengan penggunaan anggaran yang tepat, diharapkan bahwa tujuan Pemerintah dapat tergapai. Selain itu, perencanaan dan pengawasan melalui penyusunan anggaran sangatlah penting. untuk memudahkan antisipasi kondisi pemerintahan di masa depan.<sup>25</sup>

#### **a. Unsur-unsur penganggaran**<sup>26</sup>

- 1) Menentukan kegiatan atau usaha yang akan datang disebut dengan perencanaan.
- 2) Merangkum semua kegiatan program kesehatan, termasuk pelayanan individu, pelayanan warga, pengelolaan, dan pengembangan.
- 3) Dinyatakan dalam satuan moneter, hal ini dapat diterapkan pada berbagai kegiatan program kesehatan. Rupiah merupakan mata uang yang umum digunakan di Indonesia.
- 4) Merujuk pada periode waktu tertentu di masa depan, menyiratkan bahwa anggaran mencakup perkiraan tentang peristiwa dan kegiatan yang dijadwalkan untuk masa depan.

#### **b. Manfaat penganggaran**<sup>27</sup>

Penganggaran memiliki tiga manfaat, diantaranya:

- 1) Sebagai alat panduan, penganggaran menetapkan arah dan sasaran yang wajib dicapai oleh aktivitas program.
- 2) Sebagai alat koordinasi kerja, penganggaran membantu dalam mengkoordinasikan upaya kerja sehingga semua bagian institusi kesehatan dapat bekerja sama dalam memperoleh tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Penganggaran sebagai alat pengawasan kerja, digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi

---

<sup>24</sup> Budi Bagaskoro, 'Analisis Anggaran Operasional Dan Realisasinya Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Penilaian Kinerja Perusahaan', *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2.3 (2017), 324–37.

<sup>25</sup> Budi Bagaskoro.

<sup>26</sup> M Munandar, *Budgeting: Perencanaan Kerja Pengorganisasian Kerja Pengawasan Kerja* (Yogyakarta: PT BPFE UGM, 2001).

<sup>27</sup> Munandar.

pelaksanaan kegiatan program dengan membandingkan antara rencana dan realisasi yang telah dilakukan.

Penyusunan anggaran memiliki empat tujuan, yakni: membantu sektor publik mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi di antara unit-unit di dalamnya, mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melewati tahapan-tahapan utama, memfasilitasi pemerintah dalam mencukupi belanja terpenting, serta memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi sektor publik.<sup>28</sup>

### c. Tahapan Penyusunan Anggaran

Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tugas yang saling terkait dan diatur untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Prosedur ini umumnya mencakup alur kerja dalam bentuk bagan alur, formulir, dan deskripsi tugas yang tercantum dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) organisasi.<sup>29</sup>

#### 1) Tahap Persiapan

Sebelumnya, anggaran akan disusun untuk tahun mendatang seharusnya dipersiapkan beberapa bulan sebelum tahun penyusunan anggaran dimulai, agar dapat segera digunakan saat awal tahun anggaran. Tanggal 1 Januari hingga 31 Desember biasanya tahap persiapan dimulai. Sebelum merencanakan anggaran, langkah pertama adalah menentukan rencana besar organisasi, meliputi tujuan, kebijakan, dan asumsi yang akan menjadi dasar perencanaan anggaran. Selanjutnya, panitia perencana anggaran beranggotakan ketua, sekretaris, dan anggota lain yang akan dibentuk.

#### 2) Tahap Penyusunan

Tahapan ini menyusun rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya (beban) dan rencana pembiayaan dengan melibatkan pihak-pihak terkait pada bidang yang direncanakan.

---

<sup>28</sup> Fanda Mentang, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan, 'Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15.2 (2020), 131 <<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28006.2020>>.

<sup>29</sup> Moh. Mahsun, *Penganggaran Sektor Publik*, Cetakan pe (Banten: Universitas Terbuka) <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>>.

- 3) Tahap Ratifikasi (Pengesahan)  
 Pada tahap ini dilakukan pembahasan untuk menyempurnakan rencana akhir untuk setiap komponen anggaran, serta kolaborasi dan review setiap komponen anggaran. Setelah itu, anggaran akan disahkan dan didistribusikan kepada pengguna anggaran.
- 4) Tahap Implementasi dan Pertanggungjawaban  
 Pada tahap ini, dilakukan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah disahkan. Selain itu, dilakukan penyusunan LRA bagi setiap pengguna anggaran, serta analisis varian (selisih) yang kemudian diserahkan kepada pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya.

#### 4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut APBD di Indonesia berupa dokumen anggaran daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Secara keseluruhan, ini adalah salah satu instrumen kebijakan yang dipergunakan sebagai alat peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga negara di suatu wilayah kota dan kabupaten yang menggambarkan kebutuhan warga dengan mempertimbangkan potensi dan sumber kekayaan daerah.<sup>30</sup>

APBD bersifat politis proses yang menjadi instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana umum dan pelaksanaannya program yang didanai dengan dana publik.<sup>31</sup> Secara sederhana, APBD menggambarkan keadaan keuangan pemerintah daerah, yang dalamnya terdapat rincian pendapatan, belanja, dan kegiatan.

APBD yaitu suatu rencana pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran yang sebelumnya sudah didiskusikan dan kemudian disahkan melalui peraturan daerah.<sup>32</sup> Pada hakikatnya APBD merupakan alat untuk mengoptimalkan pelayanan umum dan kesejahteraan warga negara sesuai dengan sasaran otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena

---

<sup>30</sup> Berti Indah Sari and Halma Wati, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3.1 (2021), 1–11 <<https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>>.

<sup>31</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.

<sup>32</sup> D. A. D. Nasution, *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Dae- Rah)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

itu, APBD wajib mencerminkan kebutuhan warga dengan mempertimbangkan potensi keberagaman daerah.<sup>33</sup> APBD ditetapkan sebagai kerangka penerimaan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan negara daerah, yang merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

## 5. Laporan Realisasi Anggaran

### a. Pengertian

Menurut Siregar dalam Fanda Mentang, LRA atau Laporan Pendapatan Daerah adalah dokumen yang menginformasikan ringkasan tentang asal usul, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini juga menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya.<sup>35</sup> LRA meyajikan hal-hal seperti realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelapor serta entitas akuntansi. Setiap aspek disandingkan dengan anggaran yang sesuai untuk perbandingan.<sup>36</sup> Informasi ini dipergunakan oleh pengguna laporan untuk menilai keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, memastikan akuntabilitas, dan memastikan kepatuhan entitas pelapor dan entitas akuntansi kepada anggaran dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan, yang bermanfaat untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan wawasan berharga dengan merangkum sumber daya ekonomi yang diproyeksikan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah di masa depan melalui laporan perbandingan.

---

<sup>33</sup> Muhammad Bahrul ulum dan Ayu Geby Gisela Syaputri.

<sup>34</sup> S Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (3rd ed.) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>35</sup> Mentang, Sabijono, and Pangerapan.

<sup>36</sup> Viony Sinatraz and Sugi Suhartono, 'Jurnal Akuntansi Dan Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6.1999 (2021), 1–13.

Pengguna menerima informasi mengenai proyeksi pendapatan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi :

- 1) Dilakukan secara efisien, efektif, dan hemat.
- 2) Dilakukan sesuai dengan anggaran APBD.
- 3) Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, sangat penting untuk mengidentifikasi dengan jelas dan berpotensi mengulangi informasi berikut pada setiap halaman laporan : nama entitas pelapor dan entitas akuntansi atau bentuk sebutan lainnya, periode yang dipilih, mata uang pelaporan, dan satuan numerik yang digunakan. Laporan Realisasi Anggaran wajib ditampilkan minimal satu kali dalam setahun.<sup>38</sup>

Kegunaan LRA akan berkurang jika laporan tersebut tidak segera tersedia. Rumitnya operasional Pemerintah Daerah tidak bisa menjadi alasan entitas pelaporan dan akuntansi gagal mempublish laporan keuangan dengan cepat. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan, entitas pelapor wajib menyajikan LRA paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, sedangkan entitas akuntansi wajib menyajikannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku.<sup>39</sup>

Perlu diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk menilai kinerja pemerintah atau dinas. LRA memuat informasi mengenai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan komponen-komponen ini, LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas dan efisiensi anggaran. Penghitungan ini dapat dilaksanakan dengan

---

<sup>37</sup> Himyar Pasrizal and Fajrur Rahmi, 'Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), 149 <<https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.2758>>.

<sup>38</sup> Syafrudin, 'Peraturan Wali Kota Serang', 2016, pp. 1–23.

<sup>39</sup> Karjono and Sulistianingsih, 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23.3 (2020), 272–302.

menyandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataannya.<sup>40</sup>

#### b. Analisis Realisasi Program

Analisis kebijakan perlu dilakukan dalam setiap program yang direncanakan, karena akan menetapkan sebuah tujuan. “Analisis kebijakan, sebagai disiplin intelektual terhadap masalah umum mengaplikasikan beberapa teknik dan gaya (*techniques and style*) tergantung kepada permasalahan dan orientasi para analis (*problem and orientation of the analyst*)”. Analisis realisasi program akan berorientasi pada pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran akan memperlihatkan sejauh mana kinerja yang diperoleh pada suatu periode tertentu selaras dengan rencana awal, memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi.<sup>41</sup>

### 6. Kinerja

Menurut Mahsun, kinerja mengacu pada penilaian keberhasilan pengelolaan keuangan selama pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau kegiatan, yang bertujuan untuk menggapai target, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah.<sup>42</sup> Kinerja berkaitan dengan penilaian sejauh mana suatu aktivitas atau program mencapai target, tujuan, visi, dan misi yang disahkan oleh organisasi. Daftar tujuan merupakan bagian dari persiapan strategi organisasi. Kinerja keseluruhan menunjukkan pencapaian yang dikumpulkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.<sup>43</sup>

#### a. Pengukuran Kinerja

Kinerja organisasi publik harus dinilai kesuksesannya untuk dapat dievaluasi kualitas pelayanan umum yang mereka bagikan.<sup>44</sup> Pengukuran kinerja melibatkan penilaian

---

<sup>40</sup> Wahyu Heri Prasetyo and Agustina Prativi Nugraheni, ‘Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas’, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11.1 (2020), 1–10.

<sup>41</sup> Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

<sup>42</sup> M Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2006).

<sup>43</sup> Bastian.

<sup>44</sup> Paisal Jadid, Lalu Husnan, and Laila Wardani, ‘Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Paisal Jadid / A1B118175 / Analisis Kinerja’, *Jurnal*

pencapaian pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini mencakup evaluasi efisiensi penyediaan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (diukur berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan), membandingkan hasil program dengan tujuan yang diharapkan, dan menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Mahmudi, pengukuran kinerja adalah sebuah sarana untuk mengevaluasi pencapaian suatu organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, pencapaian organisasi ini dipergunakan untuk memperoleh pengakuan dan *support* dari warga. Masyarakat akan melihat pencapaian organisasi sektor publik berdasarkan kemampuannya dalam memberikan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas.<sup>46</sup>

Menurut Hansen & Mowen dalam Aulia dan Nugraheni, ada dua jenis perhitungan kinerja : klasik dan modern. Secara tradisional, kinerja dinilai dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran yang telah ditentukan, dengan mengikuti prinsip akuntabilitas. Sebaliknya, pendekatan pengukuran kinerja modern lebih berkonsentrasi pada aktivitas. Pendekatan modern bertujuan untuk memantau aktivitas dan kinerjanya, mengupayakan perbaikan berkelanjutan.<sup>47</sup>

Keuntungan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik bermacam-macam. Pertama, ia menawarkan wawasan mengenai metodologi evaluasi kinerja dalam manajemen. Kedua, memberikan pedoman agar dapat menggapai tujuan kinerja dan mengantisipasi. Ketiga, memfasilitasi pemantauan dan pemanfaatan data kinerja, sehingga memungkinkan perbandingan dengan target kinerja. Selain itu, ini membantu dalam mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini juga berfungsi sebagai metrik untuk mengukur kinerja, menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang diukur secara objektif melalui sistem pengukuran kinerja yang digunakan.

---

*Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Universitas Mataran (JRK)*, 1.1 (2020), 56–67.

<sup>45</sup> M Mahsun.

<sup>46</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN, 2007).

<sup>47</sup> Aulia and Nugraheni.

Terakhir, bertindak sebagai alat komunikasi antara pemimpin dan bawahan, mendorong optimalisasi kinerja bisnis.<sup>48</sup>

#### **b. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Organisasi sektor publik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan sosial, oleh karena itu pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai sejauh mana keberhasilan misi sektor publik dalam menyediakan pelayanan dan barang publik. Selain itu, dari sudut pandang internal organisasi, pengukuran kinerja sangat berguna dalam membantu aktivitas manajerial dalam organisasi.<sup>49</sup> Menurut Mahsun, pengukuran kinerja memiliki beberapa manfaat yang mencakup:<sup>50</sup>

- 1) Menjamin pemahaman para pelaksana terhadap metrik yang digunakan dalam menilai kinerja.
- 2) Menjamin pencapaian rencana kinerja yang sudah disetujui.
- 3) Melacak dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, membandingkannya dengan rencana kerja, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.
- 4) Memberikan pengakuan dan sanksi yang berdasarkan keberhasilan yang dihitung sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disetujui.
- 5) Berfungsi sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kebutuhan pelanggan telah terpenuhi.
- 7) Membantu dalam pemahaman tentang proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Menjamin pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- 9) Menunjukkan area-area yang perlu diperbaiki.
- 10) Mengungkapkan masalah-masalah yang muncul.

#### **c. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan mencerminkan situasi finansial perusahaan pada periode tertentu, termasuk bagaimana

---

<sup>48</sup> Luthfia Ayu Karina and Wahyu Ramadhani, 'Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong', *Value*, 2.2 (2022), 71–82 <<https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>>.

<sup>49</sup> M Mahsun.

<sup>50</sup> M Mahsun.

perusahaan mengumpulkan dan mengalirkan dana. Umumnya, kinerja keuangan dinilai dengan memperhatikan indikator-indikator seperti kepuasan modal, likuiditas, dan profitabilitas.<sup>51</sup> Menurut Francis Hutabarat, Kinerja keuangan melibatkan penilaian terhadap bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, yang hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.<sup>52</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan mencerminkan seberapa efektif suatu perusahaan mengelola dan menggunakan dananya dalam meraih keberhasilan finansial dalam periode tertentu. Ini tercermin dari laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara periodik.

Hasil dari upaya perusahaan ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilannya dalam menghasilkan keuntungan selama periode akuntansi, yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan.<sup>53</sup> Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil evaluasi kuantitatif terhadap kegiatan atau program dalam mencapai target dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan merumuskan tindakan yang diambil guna meningkatkan kualitas sektor publik.<sup>54</sup>

Ada dua jenis kinerja keuangan: kinerja keuangan sektor publik dan sektor swasta. Kinerja keuangan sektor publik mencakup evaluasi keberhasilan keuangan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan anggaran, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran. Tujuan kinerja keuangan sektor publik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja keuangan secara hemat, efisien, dan efektif. Sedangkan kinerja keuangan sektor swasta hanya fokus pada optimalisasi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan sektor swasta memiliki arti penting dalam

---

<sup>51</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Pe (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

<sup>52</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Banten: Desanta Multiavisitama, 2020).

<sup>53</sup> Bilqist Luthfia Rachmi, Ade Ali Nurdin, and Banter Laksana, 'Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Pada PT Kimia Farma Tbk Tahun 2016-2020', *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2.1 (2021), 95-107 <<https://doi.org/10.35313/ijem.v2i1.3107>>.

<sup>54</sup> Sari and Wati.

pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, laba berfungsi sebagai salah satu kriteria untuk memperkirakan kinerja keuangan perusahaan swasta. Perusahaan yang menguntungkan biasanya dianggap memiliki kinerja keuangan yang unggul dibandingkan dengan perusahaan yang merugi.<sup>55</sup>

**B. Penelitian terdahulu**

Adapun beberapa penelitian mengenai kinerja sebuah pemerintahan dengan menggunakan metode *value for money* sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurul Mutmainnah, 2022	Analisis Pengukuran kinerja Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. <sup>56</sup>	Rasio ekonomis pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sangat ekonomis. Rasio efisiensi pada tahun 2018-2020 Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dikategorikan tidak efisien. Rasio efektifitas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sangat efektif.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian deskriptif.</li> <li>b. Mengaplikasikan metode <i>value for money</i>.</li> <li>c. Objek penelitian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan</li> </ul>			

<sup>55</sup> Jadid, Husnan, and Wardani.

<sup>56</sup> Mutmainnah.

	dan Belanja Daerah (RAPBD). <b>Perbedaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Nurul Mutmainnah menggunakan objek APBD sedangkan penelitian ini RAPBD.</li> <li>2. Populasi penelitian Nurul Mutmainnah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020 sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</li> </ol>		
2	C. Susi Maryanti & Agus Munandar (2021)	Analisis <i>Value For Money</i> Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. <sup>57</sup>	Dari analisis aspek ekonomis tahun 2015-2018 cukup ekonomis, namun tahun 2019 kurang ekonomis. Aspek efisiensi 2015-2019 tidak efisien karena terjadi pemborosan pada sektor belanja barang dan jasa. Tingkat efektivitas masuk kategori sangat efektif.
	<b>Persamaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti memilih data sekunder.</li> <li>b. Data yang digunakan adalah LRA</li> <li>c. Analisis teknis data adalah Collecting/ Pengumpulan data.</li> <li>d. Mengaplikasi-kan metode <i>Value For Money</i>.</li> </ol> <b>Perbedaan:</b> Populasi penelitian C. Susi Maryanti & Agus Munandar adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2015-2019 sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.		
3	Tito Aditya Perdana, Risanda A. Budiantoro, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra (2020)	Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis <i>Value For Money</i> . <sup>58</sup>	Fokus perhatian pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama. Secara keseluruhan, hasil pengukuran ketiga

<sup>57</sup> Maryanti and Munandar.

<sup>58</sup> Perdana, Budiantoro, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra.

			<p>komponen tersebut menunjukkan kinerja yang baik. Selama periode penelitian, rasio ekonomi memperlihatkan hasil yang konsisten dan menunjukkan tren peningkatan. Rasio efisiensi memperlihatkan tingkat efisiensi yang sangat baik sepanjang periode penelitian. Namun, untuk rasio efektivitas, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dari tingkat efektivitas hingga sangat efektif selama periode tersebut.</p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengaplikasi-kan metode <i>Value For Money</i>.</li> <li>Peneliti memilih data sekunder.</li> <li>Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Populasi penelitian Tito Aditya Perdana, Risanda A. Budiantoro, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2014-2018 sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</p>			
4	<p>Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi, dan Pipiet Niken Aurelia (2023)</p>	<p>Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah</p>	<p>Temuan dari penelitian mperlihat-kan bahwa pelaksanaan program, yang dinilai dari aspek ekonomi selama periode 2019-2021, memenuhi standar ekonomis. Pada tingkat efisiensi selama 2019-2021</p>

		Kabupaten Sikka. <sup>59</sup>	berada pada kriteria efisiensi, sedangkan pada tingkat efektifitas selama 2019-2021 berada pada kriteria tidak efektif.
	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengaplikasi-kan metode <i>Value For Money</i>.</li> <li>Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif.</li> <li>Teknik pengambilan sampel dengan <i>Purposive Sampling</i> dengan memilih Laporan Realisasi APBD.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi, dan Pipiet Niken Aurelia menggunakan objek Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD sedangkan penelitian ini hanya RAPBD.</li> <li>Populasi penelitian Adriana Alesandra Da Cunha, Henrikus Herdi, dan Pipiet Niken Aurelia adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tahun 2019-2021 sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</li> </ol>		
5	Ade Irma Suryani Lating, Hayudian Kusumandaru, Mochammad Ilyas Junjunan, Eva Wany (2023)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan <i>Value For Money</i> . <sup>60</sup>	Manajemen keuangan di Desa Sepande telah memenuhi standar ekonomis dengan persentase perhitungan sebesar 96%. Sementara itu, capaian efisiensi juga terpenuhi dengan hasil perhitungan sebesar 96%, sementara efektivitas mencapai 100%. Dari hasil penelitian tersebut, ditarik

<sup>59</sup> Henrikus Herdi Cunha, Adriana Alesandra Da and Pipiet Niken Aurelia, 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka', *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2 No.3 (2023), 86–100 <<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1180>>.

<sup>60</sup> Ade Irma Suryani Lating and others, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Value for Money', *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 4.1 (2023), 18–37 <<https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2340>>.

			kesimpulan bahwa implementasi <i>value for money</i> di Desa Sepande telah berhasil memastikan akuntabilitas publik oleh pemerintah desa kepada warganya.
	<p><b>Persamaan:</b> Mengaplikasikan metode <i>Value For Money</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian yang dilakukan Ade Irma Suryani Lating, Hayudian Kusumandaru, Mochammad Ilyas Junjungan, Eva Wany merupakan penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif.</li> <li>2. Populasi penelitian Ade Irma Suryani Lating, Hayudian Kusumandaru, Mochammad Ilyas Junjungan, Eva Wany adalah Pemerintahan Desa Sepande, Candi, Sidoarjo. sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</li> </ol>		
6	I Nyoman Utama, Fani Fatona , Nining Sudyarti (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> (Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumba Barat). <sup>61</sup>	Menggunakan konsep <i>value for money</i> , dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dari segi rasio ekonomi, kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dinilai tidak ekonomis karena rasionya melebihi 105%. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tidak

<sup>61</sup> I Nyoman Utama, Fani Fatona, and Nining Sudyarti, 'Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money (Studi Di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)', *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 2.2 (2022), 193–200 <<https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1020>>.

			<p>melampaui sasaran yang sudah disusun.</p> <p>Dari segi rasio efisiensi, kinerja keuangan Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat juga dinilai tidak efisien karena rasionya mencapai angka di atas 100%. Hal ini menandakan adanya ketidakefisienan dalam pengeluaran pemerintah terkait target dan realisasi pendapatan selama dua tahun terakhir.</p> <p>Dari segi rasio efektivitas, sasaran dan realisasi pendapatan di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada periode 2020-2021 dapat dikategorikan sebagai efektif, karena berada dalam rentang antara 90% hingga 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan tidak melebihi target yang telah ditetapkan.</p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengaplikasi-kan metode <i>Value For Money</i>.</li> <li>Penelitian kuantitatif deskriptif.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Populasi penelitian I Nyoman Utama, Fani Fatona , Nining Sudiarty adalah Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumba, sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</p>			
7	Gerald William	Evaluasi Kinerja	Kinerja keuangan

<p>Sanger, Hendrik Manossoh, Claudia W. M. Korompis (2023)</p>	<p>Kuangan Dengan Metode <i>Value For Money</i> Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.<sup>62</sup></p>	<p>Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado dengan mengaplikasikan metode <i>value for money</i> sangat terpuji, berpedoman pada tiga prinsip utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan metode <i>value for money</i> yang efektif memperlihatkan bahwa penerimaan transfer dari pemerintah pusat telah baik dikelola dalam keuangan BKAD Kota Manado. Pengelolaan keuangan di BKAD Kota Manado mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pengukuran kinerja keuangan dengan metode <i>value for money</i> dilaksanakan dengan lancar dan konsisten mengutamakan kepentingan warganya.</p>
<p><b>Persamaan:</b> Menggunakan metode <i>Value For Money</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian yang dilakukan Gerald William Sanger, Hendrik Manossoh, Claudia W. M. Korompis merupakan penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif.</li> </ol>		

<sup>62</sup> Gerald William Sanger, Hendrik Manossoh, and Claudia W M Korompis, 'Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6.2 (2023), 1193–1202.

	<p>2. Populasi penelitian Gerald William Sanger, Hendrik Manossoh, Claudia W.M. Korompis adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</p>		
8	<p>Zulhelmy Hatta, Emkhad Arif, Nabilah Tyas Garini (2021)</p>	<p>Analisis <i>Value For Money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau.<sup>63</sup></p>	<p>Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018-2019 tergolong ekonomis, cukup efisien, namun kurang efektif. Pada Program Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2018-2019, kinerja keuangannya tergolong ekonomis, efisien, tetapi kurang efektif. Sementara itu, kinerja keuangan pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2018-2019 tergolong ekonomis, efisien, namun kurang efektif. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip <i>value for money</i>.</p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengaplikasi-kan metode <i>Value For Money</i>.</li> <li>Penelitian kuantitatif deskriptif.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p>			

<sup>63</sup> Zulhelmy Hatta, Emkhad Arif, and Nabilah Tyas Garini, 'Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau', *Economics, Accounting and Business Journal*, 1.1 (2021), 198–211.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data yang dipilih dalam penelitian Zulhelmy Hatta dkk adalah data primer. Sedangkan pada penelitian ini data sekunder.</li> <li>2. Populasi penelitian Zulhelmy Hatta, Emkhad Arif, Nabilah Tyas Garini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</li> </ol>		
9	<p>Aulya Dini Fania, Marti Dewi Ungkari, Cecep Hamzah Pansuri (2020).</p>	<p>Pengukuran Kinerja berdasarkan Value For Money pada Dinas Sosial Kabupaten Garut.<sup>64</sup></p>	<p>Berdasarkan analisis tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Garut tahun 2018, hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan keseluruhan masuk dalam kategori kurang patuh. Namun, jika dilihat dari aspek kepatuhan formal, wajib pajak dikategorikan baik atau patuh, karena semua wajib pajak telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan seperti mengisi formulir pajak, menghitung jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat waktu. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dari aspek kesadaran dinilai kurang patuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran bahwa penundaan</p>

<sup>64</sup> Aulya Dini Fania, Marti Dewi Ungkari, and Cecep Hamzah Pansuri, 'Pengukuran Kinerja Berdasarkan Value For Money Pada Dinas Sosial Kabupaten Garut', *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5.2 (2020), 82 <<https://doi.org/10.52434/jwa.v5i2.2024>>.

			<p>pembayaran pajak dapat merugikan negara. Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemahaman peraturan perundang-undangan dikategorikan tidak patuh, karena pengetahuan wajib pajak tentang sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang memadai.</p>
	<p><b>Persamaan:</b> Mengaplikasikan metode <i>Value For Money</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian Aulya Dini Fania, Marti Dewi Ungkari, Cecep Hamzah Pansuri menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini adalah dokumentasi.</li> <li>Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif.</li> <li>Menggunakan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP). Sedangkan penelitian ini menggunakan Laporan realisasi anggaran (LRA).</li> <li>Populasi penelitian Aulya Dini Fania, Marti Dewi Ungkari, Cecep Hamzah Pansuri adalah Dinas Sosial Kabupaten Garut. sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</li> </ol>		
10	<p>Melta Idriska, Novi Mubyarto, Efni Anita (2023)</p>	<p>Analisis Pengukuran <i>Value For Money</i> Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini adalah temuan mengenai kinerja keuangan pemerintah desa Sungai Bengkal Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Segi Ekonomi: Pada tahun 2018-2019, kinerja</li> </ol>

		<p>Iilir Kabupaten Tebo.<sup>65</sup></p>	<p>keuangan dikategorikan ekonomis dengan persentase lebih dari 100%. Namun, pada tahun 2020, kinerja keuangan dinilai kurang ekonomis dengan persentase 65%-84%. Kemudian pada tahun 2021, kembali masuk dalam kategori ekonomis dengan persentase lebih dari 100%.</p> <p>2. Segi Efisiensi: Pada tahun 2018-2019, kinerja keuangan berada dalam kategori sangat efisien dengan persentase di bawah 90%. Namun, pada tahun 2020, kinerja keuangan tidak efisien karena persentase lebih dari 100%. Pada tahun 2021, kinerja keuangan kembali dikategorikan sangat efisien karena realisasi belanja lebih rendah daripada realisasi pendapatan.</p> <p>3. Segi Efektivitas: Pada tahun 2018, kinerja keuangan</p>
--	--	---	--

<sup>65</sup> Idrika, Mubyarto, and Anita.

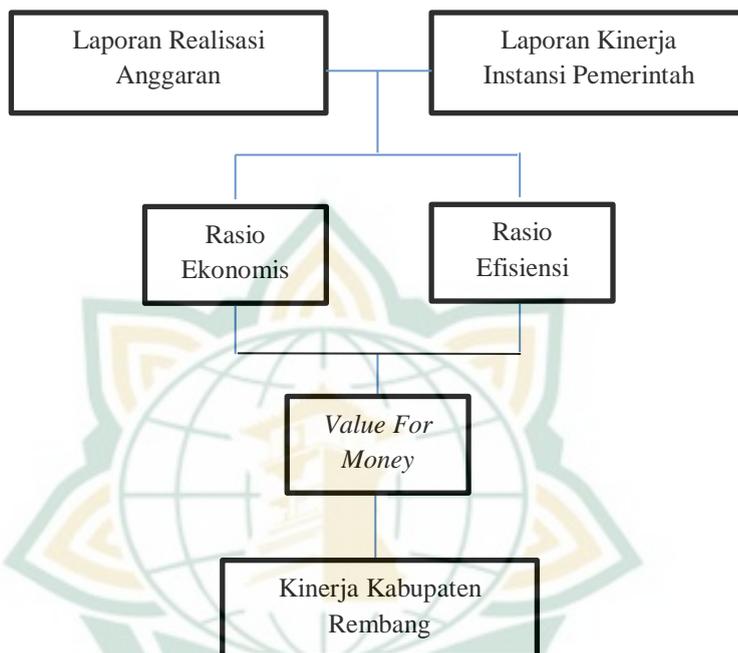
			<p>dikategorikan cukup efektif dengan persentase 85%-99%. Pada tahun 2019 dan 2020, kinerja keuangan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%. Pada tahun 2021, kinerja keuangan kembali dikategorikan cukup efektif dengan persentase 85%-99%.</p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengaplikasi-kan metode <i>Value For Money</i>.</li> <li>Penelitian kuantitatif deskriptif.</li> <li>Menggunakan laporan realisasi anggaran.</li> <li>Menggunakan data sekunder.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Populasi penelitian Melta Idrika, Novi Mubyarto, Efni Anita adalah Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. sedangkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022.</p>			

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah alur penelitian yang berfungsi sebagai pola atau dasar berpikir bagi peneliti saat mengkaji objek yang dituju. Dengan demikian, kerangka berfikir merupakan alur yang digunakan oleh peneliti untuk membentuk pola berpikir dalam meneliti suatu objek, yang membantu dalam menyelesaikan rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.<sup>66</sup> Berikut kerangka yang digunakan dalam penelitian ini :

<sup>66</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Laporan realisasi anggaran dan Laporan kinerja instansi pemerintah dalam suatu pemerintahan dapat menggambarkan kinerja pemerintahan tersebut dengan dilihat dari Aspek ekonomi (hemat cermat) dalam pelaksanaan pendapatan dan anggaran pendapatan, serta aspek efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya antara pengeluaran aktual dan pendapatan aktual. Penilaian kinerja dalam sektor publik menggunakan konsep *value for money* dapat terwujud melalui evaluasi terhadap rasio-rasio tersebut.<sup>67</sup>

Menggunakan rumus dalam metode *value for money* kinerja kabupaten Rembang dapat dilihat secara detail dan dapat disimpulkan apakah kinerja kabupaten rembang telah baik, kurang atau cukup. Dengan hasil perhitungan dan hasil kesimpulan yang didapat maka kita dapat memeriksa apakah pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program sesuai dengan aspek ekonomis dan efisiensi, laporan tersebut dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap kinerja anggaran dan program di Kabupaten Rembang.

<sup>67</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.